

RINGKASAN

SANDY PRABOWO 210510007 **ANALISIS PEMBERIAN PUTUSAN
PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS MINIMUM
KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
59/PID.SUS/2024/PN LSM)**

**(Romi Asmara, S.H.,M.Hum, dan Dr. Hamdani,
S.H.,LL.,M.)**

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana serta sanksi pidana dengan batas minimum dan maksimum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, praktik penegakan hukum dalam kasus narkoba terkadang menimbulkan diskursus, salah satunya dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, yang menjatuhkan pembedanaan di bawah batas minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian putusan pembedanaan di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkoba Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm.

Berdasarkan Hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Penerapan hukum terkait sanksi pembedanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba adalah hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun kebebasan yang dimiliki tidaklah bersifat mutlak, hakim dibatasi oleh hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memutus perkara. Dalam penjatuhan hukuman dibawah batas minimum khusus pada putusan nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, hakim memutus berdasarkan surat dakwaan tetapi terhadap ketentuan pembedanaanya dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian putusan pembedanaan dibawah batas minimum khusus mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm hakim lebih cenderung pada pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan menerapkan asas individualitas pembedanaan.

Saran 1) Hakim sebaiknya menjatuhkan putusan pembedanaan tetap berdasarkan pada ketentuan minimum dan maksimum khusus yang diatur dalam undang-undang narkoba. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan nakotika. 2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba harus lebih cermat, teliti dan adil, agar keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.

Kata Kunci : Pembedanaan, Batas Minimum Khusus, Narkoba.

SUMMARY

SANDY PRABOWO
210510007

***ANALYSIS OF SENTENCING BELOW THE
SPECIAL MINIMUM THRESHOLD IN
NARCOTICS CRIMINAL CASES (CASE STUDY
OF DECISION NUMBER 59/PID.SUS/2024/PN
LSM)***

**(Romi Asmara, S.H.,M.Hum and Dr. Hamdani,
S.H.,LL.,M.)**

In an effort to eradicate narcotics crimes, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates provisions regarding the types of criminal offences as well as criminal sanctions with minimum and maximum limits that aim to provide a deterrent effect to the perpetrators. However, the practice of law enforcement in narcotics cases sometimes causes discourse, one of which is in Decision Number 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, which imposes a sentence below the specific minimum limit specified in the law.

The research method used in this research is normative juridical research. This study aims to analyse the provision of sentencing decisions below the special minimum limit in narcotics crimes Study of Decision Number 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm.

Based on the results of the study, it is known that: 1) The application of law related to punishment sanctions below the special minimum limit in narcotics crime cases is that judges have the freedom to make decisions, but their freedom is not absolute, judges are limited by laws or regulations as a basis for deciding cases. In imposing a sentence below the special minimum limit in decision number 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, the judge decides based on the indictment but on the provisions of the sentence can deviate from the special minimum provisions by making sufficient considerations in accordance with SEMA Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2015 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court. 2) The basis for judges' considerations in giving sentencing decisions below the special minimum includes juridical and non-juridical considerations, in Decision Number 59/Pid.Sus/2024/Pn Lsm judges are more likely to use non-juridical considerations by applying the principle of individuality of punishment.

Suggestions: 1) Judges should impose fixed sentences based on the specific minimum and maximum provisions stipulated in the narcotics law. This is intended to provide protection to the public from the dangers of narcotics and provide a deterrent effect to the perpetrators of narcotics abuse. 2) The consideration of judges in deciding narcotics crime cases must be more careful, thorough and fair, so that the decisions taken can provide legal certainty, justice and benefits, both for the convicted person and the wider community.

Keywords: Sentencing, Special Minimum, Narcotics.